

BLT COVID-19 DIDUGA DIKORUPSI

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

cair pada September 2020 itu, selain sudah dipotong, juga baru ia terima pada Februari 2021, alias mengendap selama lima bulan.

"Itu pun diterima oleh klien kami, setelah klien kami mempertanyakannya kepada PNM saat akan membayar angsuran pinjaman modal," kata Alex Safri yang menjadi kuasa hukum Aisyah.

Selain dugaan korupsi,

Alex juga menyebut, aksi PNM Mekaar—kebetulan kliennya menjadi nasabah Cabang Rengasdengklok, yang membuka PIN dan mengaksesnya sendiri juga tindakan yang menyalahi aturan.

"Bahwa perbuatan salah satu BUMN ini yang dengan tanpa dasar mencairkan dan memotong dana bantuan dari negara milik klien kami merupa-

kan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dalam pasal 2, pasal 3 UU UU Tipikor junto pasal 374 KUHP," kata dia.

Alex pun menuturkan tak menutup kemungkinan bakal melaporkannya langsung kepada penegak hukum dan juga menuntutnya secara perdata.

Di tempat lain Kepala Dinkop UMKM Karawang, Ade Sudiana tidak mengetahui be-

rapa jumlah pengajuan bantuan dan yang di-realisis dari PNM Mekaar. Karena, kata Ade pencairan dari pemerintah pusat tidak turun melerati DinkopUMKM Karawang.

Namun untuk informasi, pengajuan keseluruhan di Karawang di luar pengajuan secara online, jumlahnya mencapai 163.439 ajuan penerima dana bantuan UMKM. (mhs)